

**KRITIK TERHADAP PANDANGAN TAQIYUDDIN
AN-NABHANI TENTANG KONSEP MASYARAKAT**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

BAIQ NURUL NAHDIAT
NIM : 12540006

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Formalisasi agama yang diperjuangkan agen atau kelompok garis keras yang terbiasa dengan literalisme tertutup lebih didorong oleh motivasi politik daripada agama. Dari sudut pandang mana pun sulit menerima politisasi agama sebagai bagian dari ajaran Islam, sebab formalisasi agama adalah pengebirian terhadap agama itu sendiri. Maka, agama pun akan kehilangan pesan-pesan luhurnya, yang tersisa hanyalah simbol-simbol keagungan agama. Bahkan, bagi agen atau kelompok garis keras dengan alasan formalisasi agama ini, mereka merasa berhak melakukan kekerasan dan bersikap garang terhadap kelompok lain di luar mereka.

Dalam Buku Ainur Rofiq yang berjudul Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia (sebagai gerakan garis keras), ia berpendapat bahwa khilafah yang diusung Taqiyuddin An-Nabhani atau khilafah-nya Hizbut Tahrir berpotensi bermetamorfosis menjadi sistem politik semi absolut-autokratis. Dikatakan demikian, sebab secara konseptual, tidak semua konsep negara khilafah sama persis dengan sistem politik absolut-autokratis. Namun dalam beberapa hal, prinsip-prinsip negara dan pemerintahan khilafah mempunyai kesamaan, bersinggungan, saling menyerap, bahkan tumpang tindih satu dengan yang lain.

Kesempurnaan Islam secara substantif yang dapat diwujudkan melalui suatu lembaga atau institusi untuk mengatur masyarakat, memang bisa dimaklumi. Namun, kesempurnaan Islam dapat diwujudkan hanya melalui tegaknya institusi khilafah HT/HTI, merupakan suatu keyakinan yang dipaksakan, bahkan a-historis. Demikianlah, khilafah akan mereduksi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Eksekusinya sangat merugikan dan sekaligus mengingkari cita-cita para *founding fathers* negara Indonesia yang mendasarkan pada kebhinekaan dan kearifan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kajian ulang terhadap sistem khilafah-nya Hizbut Tahrir agar khilafah tidak sekadar sebagai *quasy-Islamic* (seakan-akan saja sesuai dengan Islam), namun faktanya bisa menjadi semacam *false consciousness* para pengikutnya.

Keyword: *Khilafah, HT/HTI, Islam Garis Keras, Politik, Agama, False Consciousness*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baiq Nurul Nahdiat
NIM : 12540042
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat rumah : Kp. Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Alamat di Yogyakarta : Kanoman No. 360, RT. 10/ RW. 20, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Telp./Hp. : 087739885015
Judul : KRITIK TERHADAP PANDANGAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KONSEP MASYARAKAT.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Pembuat Pernyataan,



Baiq Nurul Nahdiat
NIM. 12540042



SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dosen: Dr. Masroer, S. Ag., M. Si
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Baiq Nurul Nahdiat
NIM : 125400042
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama
Judul Skripsi : **Kritik Terhadap Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani
Tentang Konsep Masyarakat**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2019
Pembimbing,

Dr. Masroer, S. Ag., M. Si
NIP. 196910292005011001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B.493/Un.02/DU/PP.05.3/2/2019

Tugas Akhir dengan judul : **KRITIK TERHADAP PANDANGAN
TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG
KONSEP MASYARAKAT**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **BAIQ NURUL NAHDIAT**
NIM : 12540042
Telah diujikan pada : **Senin, 11 Februari 2019**
Nilai ujian Tugas Akhir : **92 (A-)**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang / Penguji I


Dr. Masroer, S.Ag., M.Si.

NIP. 19691029 200501 1 001

Penguji II


Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

NIP. 19720912 200112 1 002

Penguji III


Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

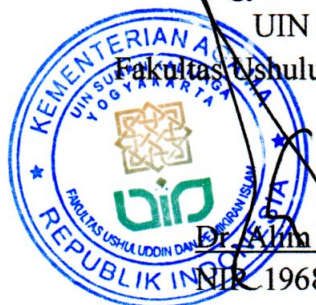
NIP. 19711019 199603 2 001

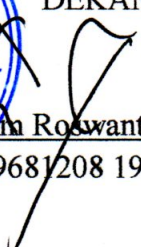
Yogyakarta, 18 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN




Dr. Alim Roswanto, M.Ag.

NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

Semua orang pernah mengalami pubertas beragama,

tapi biasanya itu tidak bertahan lama.

Asal terus belajar dan tak berhenti membaca.

(Twitter: @NUgarislucu)



PERSEMBAHAN

***Skripsi ini saya persembahkan untuk,
Ayah, Ibu, dan kakak-kakakku.***



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis mampu menjalankan berbagai aktivitas dalam mengabdikan kepada-Nya. Nikmat iman dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Konsep Masyarakat Islam Ideal Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis haturkan kepada suri tauladan umat manusia sepanjang masa, Rasulullah SAW, sang revolusioner sejati yang menjadi inspirasi setiap umat dalam memperbaiki dan menata kehidupan bermasyarakat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph. D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Alim Roswanto, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Para pembantu Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Ibu Dr. Hj. Adib Sofia, S.S., M. Hum, selaku Ketua Umum Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Munawar Ahmad, S.S., M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Dr. Masroer, S. Ag., M. Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen, karyawan dan karyawan serta seluruh sivitas akademik di lingkungan Fakultas Ushuluddn dan Pemikiran Islam.

7. Kepada Ayah, Ibu dan Kakak-kakkaku
8. Teman-teman Almamater Sosiologi Agama 2012, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Mengingat penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap bagi pembaca untuk memberikan masukan dan saran yang dapat meningkatkan kualitas dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 29 Januari 2019

Baiq Nurul Nahdiyati

NIM. 12540042



DAFTAR ISI

Hlm

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. TinjauanPustaka.....	10
F. Landasan Teori.....	12
G. Metodologi Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	22
 BAB II. PROFIL TAQIYUDDIN AN-NABHANI.....	
A. Pengaruh Politik.....	23
B. Pengaruh Sosial.....	26
C. Pengaruh Agama.....	28

D. Pengaruh Ekonomi.....	30
--------------------------	----

BAB III. KONSEP MASYARAKAT DALAM PANDANGAN

TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. Konsep Masyarakat.....	34
B. Aspek A-historis dalam Konsep Masyarakat Menurut An-Nabhani	39
C. Wacana Negara Islam	44
D. Politik Hizbut Tahrir	47
E. Demokrasi dalam Pandangan Hizbut Tahrir.....	50

BAB IV. KRITIK TERHADAP KONSEP MASYARAKAT MENURUT

TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. Menimbulkan Kekerasan	52
B. Tidak Sesuai dengan Kondisi Masyarakat yang Plural.....	53
C. Konsep Masyarakat An-Nabhani Bukan Masyarakat pada Masa Nabi	55
D. Kecacatan Sistem Khilafah.....	56
E. Menolak Demokrasi Namun Juga Memanfaatkannya.....	58
F. Mengancam Keutuhan NKRI	61
G. Kelebihan dan Kekurangan.....	67

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuatnya pengaruh spiritualitas Islam dalam ranah pemahaman dan politik telah mendorong munculnya berbagai gerakan Islam politik, yang mengukur semua diskursus kehidupan umat dengan ketentuan Tuhan. Cara pandang yang demikian juga terekspresikan dalam gerakan politik ideologis. Dari sinilah muncul ungkapan bahwa gerakan Islam politik seringkali menggunakan nama Tuhan sebagai bentuk pengejawantahan spiritualitasnya.

Taqiyuddin An-Nabhani salah satu agen pendiri kelompok radikal di Palestina, yakni Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 1953. An-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir karena faktor berdirinya Israel pada 1948 yang kemudian menjajah Palestina, tanah kelahirannya, bukan karena kehancuran Turki Ottoman pada 1924. Hal ini bisa dilihat dari rentang waktu yang panjang antara berdirinya HT (1953) dan runtuhnya Turki Ottoman (1924). Faktor penjajahan Israel atas Palestina bisa dijadikan analisis terhadap berdirinya HT. Masdar Hilmy mensinyalir HT lahir karena banyaknya solidaritas dunia atas penjajahan Israel.¹

Gerakan Islam Politik tidak bisa lepas dari pergumulannya dengan berbagai kondisi sosial, politik dan keagamaan yang plural dan terus berkembang. Berbagai unsur ini kemudian mampu melahirkan corak pemikiran politik Islam yang fundamental, bahkan radikal. Pada akhirnya spiritualitas Islam politik yang berkembang dari terbukanya keran demokrasi kemudian menjadi ajang pertarungan

¹ Masdar Hilmy, *Islam Sebagai Realitas Terkonstruksi* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 133.

berbagai wacana, persepsi, dan menjadi simbol tradisi yang akan terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan dalam masyarakat.²

1. Faktor Politik

Mengaku kecewa dengan Ikhwanul Muslimin yang dituding terlalu moderat dan terlalu akomodatif terhadap Barat, Taqiyuddin An-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir pada tahun 1953 di Jerusalem Timur yang dikuasai Yordania. Menurut An-Nabhani, umat Islam ketika itu sudah dicemari pemikiran dan emosi kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan sektarianisme. Oleh sebab itu Taqiyuddin berambisi mendirikan sebuah konsep masyarakat Islam dalam bentuk sistem *Khilafah Islamiyah Internasional* yang akan diawali dari teritori Arab dan kemudian teritori Islam non-Arab. Setelah ia wafat pada tahun 1977, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abu Yusuf Abdul Qadim Zallum yang wafat pada tahun 2003 dan kemudian digantikan oleh Ata Ibn Khaleel Abu Rashta hingga sekarang.³

Radikalisme dan sikap agresif Hizbut Tahrir terus meningkat sejak awal didirikannya hingga saat ini. Sebab itulah Hizbut Tahrir dilarang di kebanyakan negara Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hizbut Tahrir mengklaim bahwa gagasan-gagasan yang mereka perjuangkan adalah murni Islam. Klaim ini tidak bisa dipisahkan dari situasi pada masa pendirian dan formatifnya di Timur Tengah serta penolakan sepenuhnya terhadap apa pun yang berasal dari atau berkaitan dengan Barat.⁴

²Masnun dan Zusiana Elly Triantini “Spiritualitas Islam, Khilafah Islamiyah Dan Gerakan Politik Hukum Ingkar NKRI (Studi Terhadap Gerakan Politik Hizbut Tahrir Di Indonesia)” Vol 15 No.2, Desember, 2016, hlm. 194.

³ Zeyno Baran, *Hizb ut- Tahrir Islam’s Political Insurgency* (Washington: Nixon Center, 2004), hlm. 16-17 dalam Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 84-85.

⁴ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 85.

Padahal menurut Ed Husain (Seorang mantan pimpinan Hizbut Tahrir di Inggris), di samping pengaruh al-Mawardi, pemikiran an-Nabhani jelas dipengaruhi oleh Hegel, Rousseau dan tokoh-tokoh Eropa lainnya. Bahkan pemikiran politik an-Nabhani dan pemikiran Hizbut Tahrir sepenuhnya berasal dari pemikiran politik Eropa. Hanya saja, an-Nabhani mengganti term-term yang berasal dari Barat dengan term-term berbahasa Arab sehingga bernuansa Islam.⁵

2. Faktor Sosial

Taqiyuddin An Nabhani maupun Hizbut Tahrir melihat umat Islam saat ini berada dalam masa *jahiliyyah* sebagai akibat runtuhnya khilafah. Mereka bisa mengatasinya dengan mengakhiri 'ketundukan' pada Barat, memperoleh kembali identitas kolektifnya dan yang terpenting menegakkan kembali khilafah internasional dan di dalamnya hukum Islam akan diberlakukan sebagai hukum positif. Dalam hal ini Hizbut Tahrir meyakini bahwa hanya khilafah yang berhak memutuskan perang, karena itu hingga saat ini mereka menjalankan strategi penyusupan dan menunda cara-cara militer dan kekerasan dalam meraih kekuasaan,⁶ sampai mereka yakin akan menang dan berhasil dalam merebut kekuasaan untuk mendirikan khilafah ala mereka.⁷

Secara umum, sebagai akibat dari obsesi ideologi politik mereka, Hizbut Tahrir hampa spiritualitas sehingga gerakan yang dibangunnya kering dan cenderung supremasis. Bahkan dalam banyak kasus, mayoritas Hizbut Tahrir tidak mengerti tentang Islam dan hanya mengetahui aspek-aspek yang sangat artifisial. Bagaimana

⁵ Ed Husain, *The Islamist* (London: Penguin Books, 2007), h. 161-164 dalam Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 85.

⁶ Zeyno Baran (2004), hlm. 19-20 dalam Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam...* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 86.

⁷ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam...* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 86.

mungkin mereka yang tidak mengerti tentang Islam akan memperjuangkan Islam?⁸ Lemahnya pemahaman yang mendalam ini menjadi penyebab utama mereka terlena dan tergoda memperjuangkan gagasan yang dikemas dalam term-term Arab yang identik dengan Islam.⁹

Pada dasarnya, retorika kelompok-kelompok seperti ini adalah pengantar pada aksi-aksi kekerasan. Di dalamnya agama telah dimanipulasi sedemikian rupa untuk menyediakan dorongan teologis bagi para pengikut garis keras agar bersedia melakukan apa pun, hingga membunuh atau bunuh diri sekalipun jika dibutuhkan. Demi mencapai tujuan politik mereka.¹⁰

Sebuah riset mantam anggota HTI menyimpulkan bahwa ideologi yang dikembangkan oleh HT/HTI adalah ideologi utopis yang tidak akan dapat tercapai hingga kapanpun. Analisa ini juga tidak lepas dari perspektif epistemologi keislaman HT yang pada umumnya tekstual, tidak kritis atas warisan pemikiran klasik, serta *mindset* mereka yang lebih cenderung bernostalgia dengan sejarah masa lalu. Tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat menolak ideologi tersebut karena sistem pemerintahan yang di tawarkan oleh HT/HTI tidak jelas dan sejarah juga mencatat bahwa sistem khilafah juga sistem politik yang mempunyai kecacatan.¹¹

⁸ Ed Husain (2007), hlm 146-149 dan 208-209 dalam Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam...*(Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 87.

⁹ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam...*(Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 87.

¹⁰ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam...*(Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 87.

¹¹ Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012).

3. Faktor Agama

Pemikiran keagamaan Taqiyuddin sangat dipengaruhi oleh kakeknya Syekh Yusuf An-Nabhani, yang juga merupakan salah satu pelaku sejarah Turki Ottoman. Kakeknya adalah seorang *Qadli* (hakim) pada masa itu. Sehingga kita bisa mengetahui sikap spiritualitas An-Nabhani yang konservatif diturunkan oleh sang kakek. Kakeknya sering mengajak An-Nabhani menghadiri diskusi- diskusi dan majelis-majelis yang dipimpin langsung oleh kakeknya di zaman daulah Utsmaniyah, utamanya yang terkait dengan masalah-masalah fikih. Wajar bila An-Nabhani sangat eksklusif bahkan terhadap pemikiran agama di luarnya, serta menolak pemikiran-pemikiran modern seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang dianggap memiliki pemikiran berbahaya sebab menyuarakan nasionalisme.

Inilah salah satu faktor yang menjadi alasan kakunya pemikiran agama Taqiyuddin An-Nabhani dalam merepresentasikan literasi-literasi agama. Sebagaimana legitimasi berupa ayat-ayat al-Qur'an yang hakikatnya tidak membahas sistem khilafah dijadikan landasan, guna mendapat respon positif dari masyarakat dewasa ini. Ketertarikan seseorang ditentukan oleh kepentingan tertentu bukan ditentukan oleh baik-buruknya sebuah berita. Penafsiran demikian itu menurut Muhammad Zaki Abdul Qadir dikategorikan sebagai penafsiran jahat yang terpendam dalam jiwa seseorang.¹² Artinya, penafsiran seseorang terhadap sebuah teks terkadang dibarengi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, atau yang lainnya. Kondisi seperti ini juga yang menimpa kelompok An-Nabhani, Hizbut Tahrir, dimana penafsiran-penafsiran yang dilontarkan oleh Hizbut Tahrir ini sesuai dengan kelompok mereka.¹³

¹² M. Quraish Shihab, "Tafsir dan Pemasyarakatan al-Qur'an " Jurnal Suhuf Vol.1 No. 1, 2008, hlm. 1. Dalam Makmun Rasyid, *Hizbut Tahrir Indonesia Gagal Paham Khilafah* (Ciputat: Pustaka Compass, 2016), hlm. 2.

¹³ Makmun Rasyid, *Hizbut Tahrir Indonesia Gagal Paham Khilafah* (Ciputat: Pustaka Compass, 2016), hlm. 2.

4. Faktor Ekonomi

Semenjak Palestina diduduki oleh Israel, An-Nabhani memiliki setereotif buruk kepada negara-negara Asing (Amerika), karena dianggap memihak kepada Israel dengan memberikan bantuan dana maupun senjata. Sehingga An-Nabhani berpandangan kebijakan-kebijakan ekonomi Amerika hanyalah sebuah dalih yang erat kaitannya untuk menghancurkan negeri-negeri Islam

Bantuan hutang yang selama ini diberikan kepada negara-negara berkembang dan miskin, dipandang oleh An-Nabhani sebagai suatu perubahan taktik penjajahan Barat. Penjajahan di bidang ekonomi ini dilakukan melalui pinjaman-pinjaman dana. Lembaga-lembaga seperti IMF atau World Bank (Bank Dunia) hanyalah sekedar institusi yang didirikan untuk melaksanakan strategi tersebut.¹⁴

“An-Nabhani menguraikan sejarah asal mula ide ini. Bermula pada sekitar dekade 1940-an, muncul opini bahwa metode penjajahan militer harus dihapuskan. Ketika negaranegara sekutu berhasil memenangkan Perang Dunia II, di antara program yang dilancarkan Rusia adalah: pertama melanjutkan kembali serangan terhadap sistem ekonomi kapitalisme; kedua menyerang sistem penjajahan Barat; ketiga menggerakkan penduduk tanah jajahan agar melakukan revolusi; dan keempat merekayasa berbagai kejadian untuk menggoncangkan negara-negara kapitalis Barat. Oleh karena itu, Amerika memandang bahwa tidak ada jalan lain untuk mempertahankan penjajahan kecuali dengan mengubah taktik penjajahan dan tidak ada jalan untuk mengambil wilayah jajahannya dari sisa-sisa negara terjajah kecuali dengan melakukan taktik baru penjajahan.”¹⁵(Maliki, 1963:6).

“Amerika kemudian mengadopsi taktik baru untuk mengembangkan neo-imperialisme dan mulai menerapkannya dengan mengikat negara-negara yang dimerdekakan melalui berbagai hutang dan bantuan. Meski pada awalnya hal ini kelihatan samar bagi sebagian orang, sebab dibungkus dengan baju pembebasan dari cengkeraman imperialisme dan baju bantuan untuk membangun perekonomian negara. Maka peristiwa-peristiwa Kongo,

¹⁴ Irham Zaki, “Ekonomi Politik Islam (Telaah atas Pemikiran Ekonomi Politik Gerakan Hizbut Tahrir al-Islami).” Tesis pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005, hlm. 193.

¹⁵ Irham Zaki, “Ekonomi Politik Islam...” Tesis pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005, hlm. 193.

Angola dan gerakan-gerakan PBB menentang Inggris di Afrika, seperti Rhodesia dan peristiwa Irian Barat di mana PBB menggabungkan Irian ke Indonesia, semua itu merupakan bukti jelas atas langkah-langkah Amerika dalam mengawali cara neo-imperialisme dengan memberikan kemerdekaan kepada suatu bangsa lalu diikat dengan hutang.”¹⁶(Maliki, 1963:6-7).

Para agen garis keras sering berteriak bahwa orang asing, yayasan-yayasan dan pemerintah dari Barat menggunakan uang mereka untuk menghancurkan Islam di Indonesia, dan menuding ada konspirasi Zionis/Nasrani di belakangnya. Pada kenyataannya, pemerintah dan yayasan-yayasan Barat seperti Ford Foundation dan The Asia Foundation mempublikasikan program-program yang dilakukannya secara terbuka, sehingga publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya mereka lakukan dan berapa biaya yang dikeluarkannya untuknya. Walaupun dana LibForAll Foundation sangat sedikit dan kebanyakan pembina, penasehat, dan pengurusnya orang Indonesia asli, ia juga melaporkan program-program yang dilakukannya secara terbuka dan transparan.¹⁷

Pemerintah Amerika Serikat banyak membiayai pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia terkait demokratisasi di seluruh dunia. The National Democratic Institute (NDI), lembaga semi-pemerintah AS yang berusaha mendorong usaha-usaha demokratisasi di Indonesia., “secara tipikal lebih memilih mitranya berdasarkan komitmen mereka pada prinsip-prinsip demokratis dan anti kekerasan daripada keyakinan-keyakinan politiknya. Faktor lain yang juga dibuktikan dari hasil pemilu; organisasi-organisasi tingkat akar rumput dan kemampuan menerima bantuan.”¹⁸

¹⁶ Irham Zaki, “Ekonomi Politik Islam....” Tesis pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005, hlm. 193-194.

¹⁷ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam...*(Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 38.

¹⁸ Lihat Catatan Kaki Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam...*(Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 38.

5. Khilafah dan *Fals Conciuousness*

Kalau kita kaji secara kritis, maka khilafah yang disuarakan Taqiyuddin An-Nabhani atau khilafah model Hizbut Tahrir berpotensi bermetamorfosis menjadi sistem politik semi absolut-autokratis. Dikatakan demikian karena secara konseptual tidak semua konsep negara khilafah sama persis dengan sistem politik absolut-autokratis. Namun, dalam beberapa hal, prinsip-prinsip negara dan pemerintah khilafah mempunyai kesamaan, bersinggungan, saling menyerap, bahkan tumpang tindih antara satu dengan lainnya.¹⁹

Demikianlah, khilafah akan meredusir keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Eksekusinya akan sangat merugikan dan sekaligus mengingkari cita-cita para *founding fathers* negara Indonesia yang mendasarkan pada kebhinekaan dan kearifan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kajian ulang terhadap konsep masyarakat Islam yang dituangkan An-Nabhani dalam sistem khilafah ala Hizbut Tahrir agar khilafah tak sekadar *quasi-Islamic* (seakan-akan saja sesuai dengan Islam), namun faktanya bisa menjadi semacam *false conciuousness* para pengikutnya.²⁰

¹⁹ Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah...* (Yogyakarta: LKiS, 2012). 206.

²⁰ Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah...* (Yogyakarta: LKiS, 2012). 206.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil Taqiyuddin An- Nabhani?
2. Bagaimana kririk terhadap pandangan Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui profil Taqiyuddin An-Nabhani.
2. Untuk mengetahui kririk terhadap pandangan Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian tentang konsep masyarakat Islam dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap dunia akademik khususnya di Program Studi Sosiologi Agama, serta memberikan kontribusi keilmuan bagi peneliti, pembaca dan mahasiswa Sosiologi Agama agar mampu mengembangkan konsep masyarakat Islam dalam konteks keindonesiaan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dibaca sebagai referensi bagi aktivis/anggota ormas-ormas, khususnya ormas Islam di Indonesia. Sehingga bagi masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi Islam bisa lebih menghargai perbedaan juga menjunjung tinggi persatuan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan untuk bahan evaluasi pertimbangan dengan penelitian yang mempunyai kemiripan tema atau mengkaji hasil penelitian yang relevan. Setelah mengadakan penelusuran, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian lain yang meneliti judul di atas, sehingga penulis mencoba menelaah lebih dalam atas *Kritik Terhadap Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Konsep Masyarakat*.

Dalam hal ini penulis mengambil karya tulis yang berkaitan dengan penelitian tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani yang ditemukan berdasarkan penelusuran yang terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memperkuat analisis dalam penelitian kali ini. Salah satunya ialah buku yang ditulis oleh Dr. Ainur Rofiq Al-Amin berjudul "*Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Di Indonesia*".²¹ Ainur Rofiq merupakan salah satu mantan dari aktivis Hizbut Tahrir Indonesia, sehingga dengan mengambil sumber dari buku beliau akan didapatkan data yang lebih valid dan tentunya kritis. Dalam buku ini Ainur menerangkan bahwa khilafah yang diusung oleh para aktivis HT/HTI lebih merupakan produk kreativitas manusia untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sehingga bukan merupakan kewajiban agama yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Jelasnya, angan-angan mendirikan khilafah pada saat ini tak lebih dari romantisme sejarah, ahistoris dan tidak punya landasan sosial sama sekali, lebih-lebih di Indonesia sebagai negara yang plural. Dengan kata lain, klaim khilafah dapat menyelesaikan semua permasalahan kebangsaan dan kemasyarakatan hanyalah pepesan kosong belaka.

²¹Baca Ainur Rofiq Al Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012).

Selain itu, Ainur dalam bukunya ini juga mengevaluasi konsistensi HT/HTI dalam mempertahankan strategi revolusioner non-partisipasi terhadap sistem demokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa HT/HTI adalah gerakan yang sangat anti terhadap demokrasi, akan tetapi dalam prakteknya HT/HTI menggunakan salah satu aspek dalam demokrasi, yakni kebebasan berpendapat sebagai tamengnya untuk menyebarkan gagasan-gagasannya tentang khilafah. Bahkan sempat terdengar kabar bahwa HT/HTI memiliki keinginan untuk ikut serta dalam pemilu. Pergeseran ini disinyalir sebagai strategi mereka untuk menyesuaikan diri dengan konteks demokrasi di Indonesia yang mengintegrasikan mayoritas muslim ke dalam sistem demokrasi. Tak pelak, sikap ini dianggap mengkhianati doktrin revolusioner HT/HTI yang dikenal tanpa kompromi terhadap sistem demokrasi. Namun di sisi lain, HT/HTI juga menyadari bahwa sikap oposisi terhadap keterlibatan Islam dalam proses demokrasi bisa mengisolasi diri mereka dari sekutu-sekutunya.

Sehingga Ainur sampai pada kesimpulan, bahwa kewajiban mendirikan khilafah lebih sebagai interpretasi yang gegabah, ahistoris dan tidak lebih dari proyek Islamisasi yang dibungkus oleh dalil-dalil agama untuk kepentingan politik dan ekonomi, suatu orientasi yang tidak jauh berbeda dengan proyek Islamisasi negara dan masyarakat oleh gerakan radikal-fundamental Islam lainnya di belahan dunia Islam. Sementara di sisi lain, keinginan mereka untuk berpartisipasi ke dalam sistem demokrasi modern berarti pengkhianatan terhadap doktrin khilafah itu sendiri.

Terlebih jika mengkaji secara kritis, maka khilafah model Hizbut Tahrir berpotensi bermertamorfosis menjadi sistem politik semi absolut-autokratis. Dikatakan demikian, karena secara konseptual, tidak semua konsep negara khilafah sama persis dengan sistem politik absolut-autokratis. Namun, dalam beberapa hal, prinsip-prinsip negara dan pemerintahan khilafah mempunyai kesamaan, bersinggungan, saling menyerap, bahkan tupang tindih antara satu dan lainnya.

Dengan demikian, khilafah akan mereduksi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Eksesnya sangat merugikan dan sekaligus mengingkari cita-cita para *founding fathers* negara Indonesia yang mendasarkan pada kebhinekaan dan kearifan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kajian ulang terhadap sistem khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia agar khilafah tidak sekedar sebagai *quasi-Islamic* (seakan-akan sesuai dengan Islam), namun faktanya bisa menjadi semacam *false consciousness* para pengikutnya.

F. Landasan Teori

1. Ideologi

Perubahan-perubahan yang penting untuk perkembangan kekuatan-kekuatan produksi tidak hanya cenderung dicegah oleh relasi-relasi yang sedang eksis, akan tetapi juga oleh relasi-relasi pendukung institusi-institusi, dan khususnya, ide-ide umum. Ketika ide-ide umum menunjukkan fungsi ini, Marx memberikan nama khusus terhadapnya ideologi.

Sebagaimana halnya dengan istilah-istilahnya yang lain, Marx tidak selalu persis dengan penggunaan kata ideologi. Dia menggunakan kata tersebut untuk menunjukkan bentuk ide-ide yang berhubungan. Pertama, ideologi merujuk kepada ide-ide yang secara alamiah muncul setiap saat di dalam kapitalisme, akan tetapi karena hakikat kapitalisme merefleksikan realitas di dalam suatu cara yang terbalik (Larrain, 1979). Untuk hal ini dia menggunakan metafora kamera *obscura*, yang menggunakan *optic quirk* untuk menunjukkan bayang-bayang nyata yang nampak terbalik. Ini lah tipe ideologi yang direpresentasikan oleh fetisisme komoditas atau oleh uang. Meskipun kita mengetahui bahwa uang hanyalah potongan kertas yang memiliki nilai hanya karena relasi-relasi sosial yang mendasarinya, akan tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperlakukan uang seolah-olah memiliki nilai sendiri. Walaupun pada

hakikatnya kitalah yang memberi nilai kepada uang tersebut, akan tetapi yang sering terlihat adalah bahwa uanglah yang memberi kita nilai.

Tipe ideologi ini mudah terganggu karena didasarkan pada kontradiksi-kontradiksi material yang mendasarinya. Nilai manusia tidak benar-benar tergantung pada uang, dan kita sering menemui orang yang hidup membuktikan kontradiksi-kontradiksi itu. Faktanya, di sinilah level kita sering menjadi sadar akan kontradiksi-kontradiksi material yang diyakini Marx akan membawa kapitalisme ke fase selanjutnya. Misalnya, kita menjadi sadar bahwa ekonomi bukanlah sebuah sistem objektif dan independen, melainkan sebuah ranah politis. Kita menjadi sadar bahwa kerja kita bukan sekedar komoditas, dan bahwa penjualannya lewat upah menimbulkan alienasi. Atau jika kita tidak menyadari kebenaran dasar tersebut, setidaknya kita menyadari kekacauan karena gerakan politis yang terang-terangan di dalam sistem ekonomi atau perasaan alienasi kita sendiri. Di dalam pengalamatan gangguan-gangguan inilah penggunaan kedua dari ideologi relevan.

Ketika gangguan-gangguan muncul dan kontradiksi-kontradiksi material mendasar terungkap, tipe kedua ideologiakan muncul. Di sini Marx menggunakan istilah ideologi untuk merujuk kepada sistem-sistem aturan ide-ide yang sekali lagi berusaha menyembunyikan kontradiksi-kontradiksi yang berada di pusat sistem kapitalis. Pada kebanyakan kasus, mereka melakukan hal inidengan salah satu dari tiga cara berikut (1) mereka menghadirkan suatu sistem ide –sistem agama, filsafat, literature, hukum –yang menjadikan kontradiksi-kontradiksi tampak koheren; (2) mereka menjelaskan pengalaman-pengalaman tersebut yang mengungkapkon kontradiksi-kontradiksi, biasanya sebagai problem personal atau keanehan-keanehan individual; atau (3) mereka menghadirkan kontradiksi kapitalis sebagai yang benar-benar menjadi suatu kontradiksi pada hakikat manusia dan oleh karena satu hal yang tidak bisa dipenuhi oleh perubahan sosial.

Secara umum, golongan-golongan yang berkuasa menciptakan tipe kedua ideologi ini. Misalnya, Marx merujuk pada ekonom-ekonom borjuis yang merepresentasikan bentuk-komoditas sebagai yang alamiah dan universal. atau dia mengkritisi filsuf-filsuf borjuis, seperti Hegel, karena menganggap bahwa kontradiksi-kontradiksi material bisa diatasi dengan mengubah cara berpikir. Bagaimanapun, proletariat pun bisa menciptakan tipe ideologi ini. Namun, persoalannya bukan siapa yang menciptakan, akan tetapi bahwa ideologi-ideologi selalu menguntungkan golongan yang berkuasa dengan menyembunyikan kontradiksi-kontradiksi yang akan membawa perubahan sosial.

- *Agama*

Marx juga melihat agama sebagai sebuah ideologi. Dia merujuk pada agama sebagai candu masyarakat:

“Kesukaran agama-agama pada saat yang sama merupakan ekspresi dari kesukaran yang sebenarnya dan juga protes melawan kesukaran yang sebenarnya. Agama adalah napas lega makhluk yang tertindas, hatinya dunia yang tidak punya hati, spiritnya kondisi yang tanpa spirit. Agama adalah candu masyarakat.”(Marx, 1843/1970).²²

Marx percaya bahwa agama, seperti halnya Ideologi, merefleksikan suatu kebenaran, namun terbalik. Karena orang-orang tidak bisa melihat bahwa kesukaran dan ketertindasan mereka diciptakan oleh sistem kapitalis, maka mereka diberikan suatu bentuk agama. Marx dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak menolak agama, pada hakikatnya, melainkan menolak suatu sistem yang mengandung ilusi agama.²³

²² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), hlm. 74.

²³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari...* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), hlm. 74.

Bentuk keagamaan ini mudah dikacaukan dan oleh karena itu selalu berkemungkinan untuk menjadi dasar suatu gerakan revolusioner. Kita juga melihat bahwa gerakan-gerakan keagamaan sering berada di garda depan dalam melawan kapitalisme. Meskipun demikian, Marx merasa bahwa agama khususnya menjadi bentuk kedua ideologi dengan menggambarkan ketidakadilan kapitalisme sebagai sebuah ujian bagi keyakinan dan mendorong perubahan revolusioner ke akhirat. Dengan cara ini, teriakan orang-orang tertindas justru digunakan untuk penindasan selanjutnya.²⁴

- *Aktor dan Struktur*

Para pemikir dialektis juga tertarik pada dinamika hubungan aktor dan struktur sosial. Marx tentu saja sudah mengenal saling pengaruh yang terus terjadi antara level-level utama analisis sosial. Inti pemikiran Marx berada pada hubungan antara manusia dan struktur-struktur skala luas yang mereka ciptakan (Lefebvre, 1968: 8). Di satu sisi, struktur-struktur skala luas ini membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan diri mereka; di sisi lain, dia merepresentasikan suatu ancaman yang menakutkan terhadap umat manusia. Namun, metode dialektis bahkan lebih kompleks dari ini. Sebagaimana yang telah kita lihat, para dialektikawan mengakui keadaan masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.²⁵

2. Ideologi (Louis Althusser)

Sebagaimana diketahui bahwa ekspresi Ideologi diciptakan oleh Cabanis, Destutt de Tracy dan kawan-kawan yang membuhulkannya sebagai objek teori (genetic) ide. Ketika Marx memungut istilah tersebut 50 tahun sesudahnya, ia

²⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari...* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), hlm. 74.

²⁵ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari...* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), hlm. 49.

memberi arti sangat berbeda di dalam karya-karya awalnya. Di dalamnya ideologi adalah sistem gagasan dan pelbagai representasi yang mendominasi benak manusia atau kelompok sosial.²⁶

- *Ideologi Tak Memiliki Aspek Historis*

Teori ideologi-ideologi pada akhirnya, bergantung pada sejarah formasi sosial, dan juga pada sejarah mode produksi yang dikombinasi di dalam formasi sosial, serta sejarah perjuangan kelas yang berkembang di dalamnya. Dalam hal ini jelaslah bahwa tak ada lagi persoalan mengenai teori ideologi pada umumnya, karena ideologi-ideologi (didefinisikan dengan kata ganda seperti disebutkan di atas: regional dan kelas) memiliki sejarah, yang di dalamnya, instansi terakhir mengenyam determinasi yang jelas-jelas disituasikan di luar ideologi-ideologi itu sendiri, walaupun sejarah melibatkannya.²⁷

Sebagaimana tulisan Marx dalam *German Ideologi*, perumusan ini muncul dalam konteks positivism sederhana. Ideologi dipahami sebagai ilusi murni, impian belaka, sebagai ketiadaan. Semua realitasnya bersifat eksternal. Dengan demikian, ideologi dianggap sebagai konstruksi imajiner yang statusnya tepat seperti status mimpi di kalangan penulis sebelum Freud. Bagi para penulis ini, mimpi adalah hayalan belaka, kosong, hasil dari residu keseharian, yang hadir dalam susunan dan urutan yang arbitrer, bahkan kadang-kadang terbalik. Dengan kata lain, *disorder*. Ini sesungguhnya adalah status filsafat dan ideologi.²⁸

²⁶ Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies/Louis Althusser* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 34-35.

²⁷ Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis...* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 35-36.

²⁸ Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis...* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 36.

Ideologi bagi Marx adalah sebuah kumpulan imajiner, sepenuhnya impian, kosong, dan sia-sia, dibangun dari residu keseharian dari satu-satunya realitas positif dan nyata, yakni sejarah konkret dari individu material konkret, yang secara material memproduksi keberadaannya. Atas dasar inilah di dalam *German Ideologi*, ideologi tidak memiliki sejarah, karena sejarah berada di luar dirinya, tempat satu-satunya sejarah yang ada, yakni sejarah individu-individu yang konkret dan seterusnya. Oleh karenanya, di dalam *German Ideologi*, tesis bahwa ideologi tidak memiliki sejarah merupakan tesis yang sepenuhnya negatif, karena ia berarti:

- a. Ideologi sama sekali bukan apa-apa, sepanjang merupakan impian belaka (dihasilkan oleh kuasa yang memiliki pengetahuan untuk memproduksinya, jika bukan dengan jalan alienasi dalam pembagian tenaga kerja, sekalipun ini merupakan determinasi negatif pula).
- b. Frase ideologi tidak memiliki sejarah, sama sekali tidak menyiratkan arti bahwa tidak ada sejarah di dalamnya (sebaliknya, karena ia hanyalah refleksi terbalik, kosong, dan tak berarti dari sejarah riil). Arti sebenarnya, ideologi tidak memiliki sejarahnya sendiri.²⁹

Untuk menyederhanakan frase tersebut, dengan mengingat apa yang telah disebutkan tentang ideologi-ideologi, memang tepat menggunakan istilah sederhana ideologi untuk menandakan ideologi pada umumnya, yakni *omnipresent* dalam bentuk yang kekalnya dalam sejarah (= sejarah formasi sosial yang memuat kelas sosial).³⁰

²⁹ Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis...*(Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 37.

³⁰ Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis...*(Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 38.

Ideologi adalah sebuah representasi relasi individu-individu imajiner pada kondisi nyata dari eksistensinya. Ideologi merepresentasikan relasi individu yang imajiner pada kondisi-kondisi nyata dari eksistensinya. Kita umumnya dapat langsung mengenali ideologi religius, ideologi etis, ideologi legal, ideologi politik dan lain-lain –deretan panjang ‘pandangan dunia’. Tentu saja sekalipun dengan berasumsi bahwa kita tidak menjalani salah satu ideologi tersebut sebagai kebenaran (misalnya ‘iman’ pada Tuhan, Tugas dan Keadilan dan sebagainya), kita mengakui bahwa ‘pandangan-pandangan dunia’ ini sebagian besar imajiner, bila ideologi dibahas dari sudut pandang yang kritis, dengan mengujinya sebagaimana ahli etnologi menguji pelbagai mitos dari ‘masyarakat primitif’. Dengan kata lain, ideologi tidak ‘berhubungan dengan realitas’.³¹

G. Metode penelitian

Untuk penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Obyek Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya adalah riset perpustakaan (*Library Research*),³² yaitu penelitian yang kajiannya dengan cara menelusuri dan menelaah literatur-literatur serta penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Dalam hal ini obyek yang penulis maksudkan adalah kritik terhadap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai ‘Konsep Masyarakat’ yang

³¹ Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis...* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 39.

³² Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarito, 1994), hlm. 251.

dijelaskannya dalam salah satu kitab karangannya yang berjudul *Nizhamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³³ Dalam hal ini penulis memaparkan, menganalisis kemudian mengkritisi pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani yang berkaitan dengan Konsep Masyarakat.

3. Teknik analisis data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*: metode induktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkret. Kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu digeneralisasi, sehingga mempunyai sifat umum (Sutrisno Hadi: 2004). Metode ini penulis gunakan untuk memahami data yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis berusaha mempelajari pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep masyarakat agar dapat dibangun suatu sintesis yang berupa kesimpulan yang bersifat umum.

Kedua: Metode Deduktif, yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk mengambil kesimpulan mulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke yang khusus menggunakan rasio atau penalaran (Nana Sudjana: 1991). Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis data yang bersifat umum yang biasanya merupakan data yang dikutip dari berbagai buku dan jurnal mengenai kritik

³³ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hlm. 23.

terhadap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani yang erat kaitannya dengan konsep masyarakat agar dapat mengambil ketegasan menjadi sifat khusus.

Ketiga: Metode Content Analysis atau disebut dengan analisis isi, yaitu metode penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reflektif dan shahih dari data atas dasar konteksnya (Soejono dan Abdurrahman: 2005). Dalam buku Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan) Karangan Soejono S.H & H. Abdurrahman S.H disebutkan untuk menggunakan metode Content Analysis diperlukan tiga syarat yang dipakai dalam analisis isi yaitu Objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Dalam hal ini penulis menggunakan metode ini untuk menganalisa pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani yang terdapat dalam buku-buku dan jurnal.

4. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber primer:

1. Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Di Indonesia (Dr. Ainur Rofiq al-Amin).

Buku ini ialah buku yang ditulis oleh salah satu mantan aktivis HTI. Dalam buku ini penulis banyak mengkritik kekeliruan dari konsep Negara khilafah yang begitu gencar diusung oleh para aktivis HT/HTI. Memang, HT/HTI telah menjadi mata rantai penting dalam pertumbuhan gerakan militant Islam transnasional yang mewarnai dinamika masyarakat muslim berhadapan dengan pusaran modernisasi dan globalisasi. Jika dibaca dengan cermat, wacana revitalisasi khilafah dan syariat yang gigih diusung HT/HTI tidak lain adalah bagian dari gerak dinamik masyarakat muslim yang tengah menghadapi arus perubahan sosial akibat laju modernisasi dan globalisasi

yang tak tertahankan. Akan tetapi HT/HTI agaknya kurang menyadari bahwa gagasan teokratik yang terkandung di dalam sistem khilafah dan syariat akan berpotensi mendorong munculnya penguasa-penguasa otoriter yang menindas rakyat atas nama Tuhan, hal ini telah terbukti pada masa pemerintahan Islam sebelumnya. Dengan berlindung dibalik kuasa Tuhan, rezim penguasa akan bisa bertindak lebih zalim dan koruptif. Dalam buku ini penulis menghadirkan perspektif baru untuk membaca perkembangan politik Islam di Indonesia.

2. Sumber sekunder

1. Hizbut Tahrir Indonesia: Gagal Paham Khilafah (Makmun Rasyid)

Buku ini merupakan buku karangan Makmun Rasyid yang didasari atas kegelisahannya terhadap pemikiran yang berkembang di kalangan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di mana mampu membawa dampak 'kekerasan' di kemudian hari, jika konsep ini tetap dipaksakan dan diterapkan di negara multi agama ini. Jika dalam toleransi umat beragama, sikap truth claim mampu menyulut api kekerasan dalam skala eksternal, maka konsep yang dibawa HTI tidak saja mampu menyulut api dari pihak luar, tetapi di tubuh umat Islam sendiri akan terjadi perkelahian, disebabkan ketidaksatupaduan dalam mendukung ideologi utopis yang dibawa HTI.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan dalam melakukan pembahasan masalah pada skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasannya dalam lima bab, masing-masing terdiri dari:

BAB I, berisi pendahuluan, yang membahas tentang gambaran umum penelitian, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta kajian pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang/ profil dari Taqiyuddin An Nabhani. Pada bab ini akan diberikan deskripsi atas apa yang melatarbelakangi pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan agama.

BAB III, dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana masyarakat dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani.

BAB IV, dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai persoalan dalam rumusan masalah yakni kritik terhadap konsep masyarakat menurut Taqiyuddin An-Nabhani.

BAB V, bab ini menjelaskan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini berisi saran yang berkaitan dengan objek penelitian untuk para peneliti yang mungkin akan mengkaji objek yang sama di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Afiliasi tokoh-tokoh atau individu, aktivis garis keras baik lokal maupun transnasional terutama disebabkan oleh faktor-faktor seperti keuntungan finansial, kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan, lingkungan dan/atau dislokasi sosial atau lemahnya pemahaman atas ajaran agama terutama dalam hal spritualitas.

Jelas bahwa Hizbut Tahrir sebagai tunggangan An-Nabhani telah memberikan literalisme tertutup dan formalisasi agama yang amat berbahaya, baik pada tataran epistemologi maupun praktis. Formalisasi agama yang diperjuangkan An-Nabhani lebih didorong oleh motivasi politik daripada agama. Dari sudut manapun, sulit menerima politisasi agama sebagai bagian dari ajaran agama, karena formalisasi itu sendiri adalah bentuk pengebirian terhadap agama.¹

Formalisasi agama ini kemudian akan menjadikan ideologi yang diusung An-Nabhani dalam Hizbut Tahrir-nya, menjadikan gerakannya sebagai kelompok garis keras, nuansa kental yang terpampang kuat adalah kecenderungan mereka untuk menolak kompromi budaya. Sejalan dengan itu, mereka menjadikan pemahaman dirinya tentang agama sebagai *model of reality*, sebagai bentuk kongkret dan final yang harus direpresentasikan dalam realitas kehidupan apa adanya. Mereka merasa berhak memainkan peran sebagai juru bicara Tuhan, sehingga hanya tafsirnya saja yang benar dan harus diterima oleh siapapun. Ketika mengatakan bahwa hukum adalah milik Allah swt, mereka menggunakan ayat tersebut untuk memperkuat posisi politiknya karena tafsirnya tentang Islam secara langsung disandarkan kepada kebenaran mutlak Allah swt. Dengan cara demikian, mereka menolak sejarah dan

¹ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 160.

perkembangan sosioogis. Alih-alih, akan merespon kehidupan secara bijaksana, mereka malah berusaha mengembalikan kehidupan ke masa-masa yang mereka anggap ideal. Kecenderungan mereka ini pada umumnya disebabkan ketidakmampuan menjalani modernisasi secara kreatif, dan/atau menyikapi Barat secara kritis dan konstruktif.²

Tentang klaim-klaim implisit para aktivis garis keras bahwa mereka sepenuhnya memahami maksud kitab suci, dan karena itu mereka berhak menjadi wakil Allah (*khalifat Allah*) dan menguasai dunia untuk memaksa siapapun mengikuti pemahaman ‘sempurna’ mereka, sama sekali tidak bisa diterima baik secara teologis maupun politis. Mereka benar, bahwa kekuasaan hanya milik Allah swt (*la hukm illa li Allah*), tetapi tak seorang pun yang sepenuhnya memahami kekuasaan Allah swt.

Tidak sadar atau mengabaikan prinsip-prinsip ini, aktivis garis keras, yakni aktivis Hizbut Tahrir mencoba untuk mengubah Islam dari agama menjadi ideologi. Pada gilirannya, Islam menjadi dalih dan senjata politik untuk mendiskredikan dan menyerang siapapun yang pandangan politik dan pemahaman keagamaannya berbeda dari mereka. Jargon memperjuangkan Islam syariah, sebenarnya adalah memperjuangkan suatu agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai kemas dan senjata. Langkah ini sangat ampuh, karena siapapun yang melawan mereka akan dituduh melawan Islam, padahal jelas tidak demikian.

Pada saat yang sama, dengan dalih memperjuangkan dan membela Islam, mereka berusaha keras menolak budaya dan tradisi yang selama ini telah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia, mereka ingin menggantinya dengan budaya dan tradisi asing dar Timur Tengah, semata karena mereka tidak mampu membedakan agama dari kultur tempat Islam diwahyukan. Mereka selalu bersikap

² Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam...* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 106-107.

keras dan tak kenal kompromi seolah-olah dalam Islam tidak ada perintah *ishlah*, yang ada hanya paksaan dan kekerasan. Karena sikap seperti itu, HT/HTI populer disebut sebagai kelompok garis keras.

Kita harus sadar bahwa, jika Islam diubah menjadi ideologi politik, ia akan menjadi sempit karena dibingkai dengan batasan-batasan ideologis dan platform politik. Pemahaman apapun yang berbeda, apalagi bertentangan dengan pemahaman mereka, dengan mudah akan dituduh bertentangan dengan Islam itu sendiri. Sebab watak dasar dari ideologi memang bersifat menguasai dan menyeragamkan. Dalam bingkai inilah aksi-aksi pengkafiran maupun pemurtadan sering dan mudah dituduhkan terhadap orang atau pihak lain. Perubahan ini jelas mereduksi, dan mengamputasi, dan mengebiri pesan-pesan luhur Islam dari agama yang penuh kasih sayang dan toleran menjadi seperangkat batasan ideologis yang sempit dan kaku.

Pada umumnya, aspirasi kelompok-kelompok garis keras di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan Islam transnasional dari Timur Tengah. Kelompok-kelompok garis keras di Indonesia termasuk partai politiknya, menyimpan agenda yang berbeda dari ormas-ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah, NU, dan partai-partai berhaluan kebangsaan. Dalam beberapa tahun terakhir sejak kemunculannya, kelompok-kelompok garis keras telah ‘berhasil’ mengubah wajah Islam Indonesia mulai menjadi agresif, beringas, intoleran dan penuh kebencian.

Kelompok-kelompok garis keras berusaha merebut simpati umat Islam dengan jargon memperjuangkan dan membela Islam, dengan dalih tarbiyah, dakwah *amar makruf nahi munkar*. Jargon ini sering memperdaya banyak orang. Bahkan mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun, semata karena tidak terbiasa berpikir tentang spiritualitas dan esensi ajaran Islam. Mereka mudah terpancing, terpesona dan tertarik dengan simbol-simbol keagamaan.

Sementara kelompok-kelompok garis keras, yakni Hizbut Tahrir yang anggota di dalamnya memahami Islam tanpa memahami substansi ajaran Islam sebagaimana dipahami oleh para wali, ulama dan Pendiri Bangsa. Pemahaman mereka tentang Islam yang telah dibingkai oleh batasan-batasan ideologis, tafsir harfiah, atau platform politik mereka. Karena terbatasnya kemampuan memahami inilah mereka mudah menuduh kelompok lain yang berbeda dari mereka atau tidak mendukung agenda mereka sebagai kafir atau murtad.

Kelompok garis keras, sebagaimana Hizbut Tahrir sangat berbeda, bahkan hingga tingkat tertentu bertentangan, dengan tradisi dan keberagaman spritualistik ini. Mereka telah mereduksi agama menjadi sebatas kerangka tanpa daging, bahkan tanpa jiwa dan perasaan. Hal ini disebabkan pemahaman mereka yang harfiah dan tertutup, yang menyapah agama dari konteks historis, social, dan budaya pada masa risalah yang ada sesudahnya hingga saat ini. Pendekatan ini telah membuat mereka terpaku pada huruf-huruf dan tidak menyadari adanya makna-makna yang lebih luas daripada yang sekadar terkandung dalam huruf-huruf tersebut. Keluhuran dan keluasan agama direduksi sebagai makna-makna harfiah tertutup. Tiadanya kesadaran ini pula yang telah membuat mereka membuat klaim-klaim kebenaran sepihak yang didasarkan pada kebenaran menurut mereka.³

Sikap monolitik dalam beragama seperti yang ditunjukkan Hizbut Tahrir, tidak pernah memberi ruang kepada perbedaan. Dengan klaim-klaim teologis pula, mereka ingin menegaskan bahwa hanya merekalah yang benar. Di samping tuduhan-tuduhan kafir dan musyrik kepada orang lain jelas merupakan pembunuhan karakter, rekrutmen psikologis dan sangat politis. Sulit mencari landasan teologis untuk membenarkan tuduhan-tuduhan demikian. Keberagaman yang monolitik jelas menjadi ancaman, tidak hanya terhadap keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia, tetapi juga terhadap budaya dan tradisi keberagaman bangsa ini. Disadari atau tidak,

³ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam...* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 110.

ini merupakan proyek formalisasi agama yang akan berujung pada- salah satunya- ada relasi penegakkan khilafah, atau Islamisasi Negara Indonesia dan melenyapkan NKRI. Oleh sebab itu, menolak formalisasi Islam, akan menyelamatkan Islam dari reduksi dan pembajakan demi kepentingan politik, menyelamatkan Pancasila, NKRI, budaya dan tradisi keberagamaan spritualitas bangsa Indonesia.⁴

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

1. Kepada aktivis Ormas Islam di Indonesia penulis menyarankan empat resep dalam memahami agama, dan menyebarkan konsep agama, yang diantaranya: *Pertama*, komunikator, harus melakukan pembacaan terhadap pandangan kultur, kondisi sosiologis, psikologi individu dan sosial masyarakat setempat yang menjadi objek sasaran. *Kedua*, mempertautkan antara tiga faktor manusiawi (*right, power, interest*) yang dimiliki oleh masing-masing komunikator dan komunikan. *Ketiga*, menghindari pendefinisian dalam terma nilai yang mengarah pada *truth claim*. *Keempat*, melakukan identifikasi tujuan prioritas, agar semua aktor komunikasi dapat menerimanya (baca: yang humanis, kontekstual, komunikatif dan efektif) tanpa harus menimbulkan konflik apalagi yang mengarah pada kekerasan.
2. Kepada aktivis HTI, penulis menyarankan; *Pertama*, hendaknya pesan dakwah yang disampaikan tidak merupakan dakwah kebencian terhadap pemerintahan dan sistem pemerintahan yang berideologikan di luar Islam, sehingga tidak menyulut perpecahan terhadap rakyat dan pemerintah Indonesia. *Kedua*, jihad yang menjadi pegangan dalam menyampaikan pesan Islam tidak dijadikan kekerasan simbolik yang pada akhirnya akan melahirkan kekerasan destruktif. *Ketiga*,hendaknya pesan keagamaan yang disampaikan tidak melampaui wacana agama, karena jika demikianbukan lagi

⁴ Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam...* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 110-112.

berdasarkan prinsip paradigmatik melainkan terjadi pemaksaan kekuasaan dan ideologi. *Keempat*, dalam merespons perkembangan zaman, pesatnya informasi teknologi, hendaknya menggunakan pola pemikiran kritis kontekstual, agar tidak terjebak kepada praktik-praktik maupun ideologi.

3. Kepada mahasiswa Sosiologi Agama, agar lebih banyak mengkaji serta melakukan lebih banyak penelitian bagi mengenai rumusan ideal sebuah masyarakat untuk memperkaya gagasan dan referensi dari perspektif sosiologi kepada mahasiswa sosiologi agama dan pembaca pada umumnya.
4. Mengingat penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Terlebih dalam penelitian mengenai rumusan ideal sebuah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar (ed). 2002. *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina.
- Abdullah, M. Amin. 1996. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. Amin. 2006. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Intergratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman, Hafidz. 2014. *Mafahim Islamiyah: Syarah Kitab Mafahim Hizbut Tahrir*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Ahmad Izzuddin. 2005. "Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Keabsahan Undang-undang Dasar 1945." *Tesis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Makin Al, 2016. *Keberagaman dan Perbedaan: Budaya dan Agama dalam Lintasa Sejarah Manusia*. Yogyakarta: Suka Press.
- Al-Amin, Ainur Rofiq. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah Al Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: LKis.
- Ali, H.A. Mukti. 1987. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali.
- Althusser, Louis. 2010. *Tentang Ideologi Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies./ Louis Althusser*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Amstrong, Karen. 2011. *Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencarian Tuhan Dalam Agama-agama Manusia*. Terj. Zaimul Am. Jakarta: Mizan Media Utama.
- An Nabhani, Taqiyuddin. 1953. *Nizhamul Islam*. T.tp.: Hizb al-Tahrir.

- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1953. *Al-Takattul al-Hizbi*. T.tp.: Hizb al-Tahrir.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1953. *Mafahim Hizbut Tahrir*. T.tp: Hizb al-Tahrir.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. *Al-Daulah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2005. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Jakarta Selatan: HTI Press.
- Baidhawiy, Zaiyyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dalam Fahmil Rozi, 2018. “Civil Society Dan Radikalisme (Studi Atas Dukungan Nahdlatul Ulama Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)” *Skripsi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dodiman, M. Ali. 2012. *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah: Biografi Ringkas Tokoh Senior Hizbut Tahrir*. Bogor: Al Azhar Press.
- Haedar Nashir. 2006. “Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia.” *Disertasi*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Hefner, W. Robert. 2007. *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hizbut Tahrir. 2005. *Ajhizah al-Dawlah al-Khilafah*. T.tp.: Dar al-Ummah.
- Imam Mahfuzi. 2004. “Membangun Epistemologi Islam Alternatif (Studi terhadap Pemikiran Taqi al-Din al-Nabhani dalam buku al-Tafkir.” *Tesis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Irham Zaki. 2002. “Ekonomi Politik Islam (Telaah atas Pemikiran Ekonomi Politik Gerakan Hizb at-Tahrir al-Islami).” *Tesis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Masdar, Hilmy 2009. *Islam sebagai Realitas Terkonstruksi*. Yogyakarta: Kanisius.

- Masnun dan Zusiana Elly Triantini. 2016. "Spiritualitas Islam, Khilafah Islamiyah Dan Gerakan Politik Hukum Ingkar NKRI (Studi Terhadap Gerakan Politik Hizbut Tahrir Di Indonesia)" *Jurnal*. Vol 15 No.2.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Terj.Edina T. Sofia.Jakarta Barat: Indeks.
- Prasetyo, Hendro, Ali Munhanif, dkk. 2002. *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Qodir, Zuly. 2001. *Agama dalam Bayang-bayang Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qodir, Zuly. 2007. *Islam Syariah vis-à-vis Negara: Ideologi Gerakan Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qodir, Zuly. 2009. *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qodir, Zuly. 2013. *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government.
- Qutb, Sayyid. 1983. *Masyarakat Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'rif.
- Rachman, Budhy Munawar. 2004. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3S.
- Rasyid, Makmun. 2016. *Hizbut Tahrir Indonesia Gagal Paham Khilafah*. Ciputat: Pustaka Compass.

- Ritzer, George. 2010. *Teori Sosial Postmodern*. Terj. Muhammad Taufik. Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset.
- Soejono dan H. Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan Bina Adiaksara.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsul Arifin. 2004. "Objektivasi Agama sebagai Ideologi Gerakan Sosial Kelompok fundamentalis Islam (Studi Kasus Hizb al-Tahrir Indonesia di Kota Malang)." *Disertasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Umi Sumbullah. 2007. "Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi." *Disertasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Wahid, Abdurrahman (ed). 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Za'rur, Abu. 2012. *Seputar Gerakan Islam*. Terj. Yahya Abdurrahman. Bogor: Al-Azhar Press.